(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh)

#### 1. UMUM

#### a. Pendirian

Rumah Sakit Umum Daerah dr. Gunawan Mangunkusumo Kabupaten Semarang yang selanjutnya disebut RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo adalah Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Daerah, yang terletak di Jl. Kartini No. 101 Ambarawa. Dari Ibu Kota Kabupaten Semarang, Kota Ungaran, RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo berjarak kurang lebih 20 Km dan dapat dicapai melalui Jalan Raya Semarang-Yogyakarta, dari pusat kota Ambarawa ke arah utara kurang lebih 1 Km. RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo berdiri di atas tanah seluas 12.000 m² (1,2 Ha) dengan luas bangunan 8.316,95 m².

Dalam memberikan pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Gunawan Mangunkusumo Kabupaten Semarang memberikan pelayanan Rawat Jalan, Rawat Inap, Gawat Darurat serta Pelayanan Penunjang Diagnostik dengan kapasitas tempat tidur pasien 260 (dua ratus enam puluh) dengan kelas Rumah Sakit Kelas C.

Pada tanggal 27 Oktober 2011 sesuai Keputusan Bupati Semarang Nomor. 445/0529/2011, tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dengan Status Penuh maka RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo mulai dikelola dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLUD). Penetapan sebagai BLUD tersebut dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat.

Dengan pelaksanaan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Gunawan Mangunkusumo Kabupaten Semarang hal ini tentunya memberikan fleksibilitas dan keleluasaan dalam mengelola sumber daya, pelaksanaan tugas operasional publik dan pengelolaan keuangan dengan tujuan meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat menjadi lebih efisien dan efektif sehingga Rumah Sakit Umum Daerah dr. Gunawan Mangunkusumo Kabupaten Semarang mampu memenuhi tuntutan dan harapan pelanggan.

RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo menyelenggarakan kegiatan pelayanan jasa kesehatan, serta penelitian dan pengembangan kesehatan. Sifat kegiatan tersebut berfungsi sosial, profesional, dan etis dengan pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan menerapkan praktik bisnis yang sehat. Sesuai dengan hasil analisis lingkungan dan isu strategis yang terkait dengan organisasi, RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo menerapkan "Strategi Pertumbuhan" dalam menggalang dan mengarahkan seluruh sumber daya dalam mencapai tujuan yang telah menjadi konsensus bersama. Strategi pertumbuhan ditempuh karena adanya peluang untuk menambah kapasitas dan pengkayaan jenis pelayanan rawat jalan dan inap, dengan melakukan ekspansi pasar antara melalui penambahan sarana dan prasarana. Pelayanan RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo sekarang ini meliputi:

	Pelayanan Utama			
1.	Poliklinik Spesialis Penyakit Bedah			
2.	Poliklinik Spesialis Penyakit Anak			
3.	Poliklinik Spesialis Penyakit Kandungan			
4.	Poliklinik Spesialis Penyakit Dalam			
5.	Poliklinik Spesialis Rehabiliasi Medik			
6.	Polikinik Spesialis THT			
7.	Poliklinik Spesialis Penyakit Mata			
8.	Poliklinik Spesialis Penyakit Syaraf			
9.	Poliklinik Spesialis Penyakit Kulit Kelamin			
10.	Poliklinik Spesialis Jiwa			
11.	Poliklinik Spesialis Gigi Konservasi			
12.	Poliklinik Spesialis Bedah Orthopedi			
13.	Poliklinik Spesialis Gigi Bedah Mulut			
14.	Poliklinik Spesialis Gigi Umum			
15.	Poliklinik Umum			

### RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. GUNAWAN MANGUNKUSUMO CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DENGAN ANGKA PEMBANDING TAHUN 2020

(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh)

#### 1. UMUM (lanjutan)

#### a. Pendirian (lanjutan)

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	Pelayanan Utama			
16.	Poliklinik Konsultasi Gizi			
17.	Klinik VCT/Melati			
18.	Klinik TB Dots			
19.	Pelayanan Informasi Obat (PIO)			

### Pelayanan Penunjang

1. Hemodialisa4. Treadmill7. USG 4 D2. Kemoterapi5. Electro Encephalografi ( EEG )8. Bank Darah

3. Endoscopy 6. Spirometri

#### b. Visi dan Misi Rumah Sakit

#### Visi Rumah Sakit

Menjadi rumah sakit yang berkualitas, terpercaya dan kebanggaan bagi masyarakat.

#### Misi Rumah Sakit

- 1. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkompeten.
- 2. Menyediakan peralatan, fasilitas sarana dan prasarana pendukung yang memadai.
- 3. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang menyeluruh, bermutu, bertanggungjawab dan bermanfaat bagi masyarakat.

#### **Moto Rumah Sakit**

Kesembuhan dan kepuasan anda adalah kebahagiaan kami.

#### c. Tugas dan Fungsi Rumah Sakit

#### Tugas RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo

RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo mempunyai tugas pokok pelaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan kesehatan.

### Fungsi RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo

RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo dalam melaksanakan tugas pokok, menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan medik dan penunjang medik, keperawatan dan penunjang non medik, sarana dan sanitasi.
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaran urusan pemerintah di bidang pelayanan kesehatan.
- c. Pembinaan dan pelaksananaan tugas bidang pelayanan medik dan penunjang medik, keperawatan dan penunjang non medik, sarana dan sanitasi.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

### d. Susunan Dewan Pengawas, Pengurus dan Struktur Organisasi

### 1) Susunan Dewan Pengawas RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo

Dewan Pengawas merupakan lembaga yang bertugas melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo Kabupaten Semarang yang ditunjuk Struktur Organisasi Dewan Pengawas RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo berdasarkan Keputusan Bupati Semarang nomor : 954/0336/2020 tentang Pembentukan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Gunawan Mangunkusumo Kabupaten Semarang adalah sebagai berikut:

### DENGAN ANGKA PEMBANDING TAHUN 2020 (Dinyatakan dalam Rupiah Penuh)

#### 1. UMUM (lanjutan)

#### d. Susunan Dewan Pengawas, Pengurus dan Struktur Organisasi (lanjutan)

1) Susunan Dewan Pengawas RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo (lanjutan)

Ketua/Anggota	:	Wenny Maya Kartika, SH, MH
Sekretaris	:	Wahyu Yuli Priastuti, SE
Anggota	:	1. dr. Ani Raharjo, MMPM
		2. Petrus Triyono, S. Sos, M.Si

### 2) Pejabat Pengelola BLUD - RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo

Penetapan Pejabat Pengelola BLUD – RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo dilakukan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Dalam tahun 2013 untuk pengangkatan Pemimpin BLUD ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Semarang No. 954/0067/2020 tanggal 28 Januari 2020, yaitu dr. Choirul Anam, MM. Sedangkan pengangkatan pejabat teknis ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Semarang No. 954/0163/2020 tanggal 27 Maret 2020 dengan susunan sebagai berikut:

Pejabat Teknis dan Pejabat Keuangan BLUD

No	Jabatan	Nama
1.	Kepala Bidang Pelayanan dan Penunjang Medik	dr. Kusworo Yulianto, MM
2.	Kepala Bidang Keperawatan dan Penunjang Non Medik	Bambang Pujiarto, S. Kep, Ns, MM.
3.	Kepala Bidang Sarana dan Sanitasi	Win Puji Kusmiarto, SKM
4.	Kepala Bagian Tata Usaha	Ganti Sumiyati Wahyuningsih, S.Kep.,MM.

#### 3) Struktur Organisasi RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo

Struktur Organisasi RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No: 03 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang dan Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Ambarawa sesuai dengan Peraturan Bupati Semarang No 106 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Gunawan Mangunkusumo Kelas C pada Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang adalah sebagai berikut:

No	Jabatan	Nama
1.	Direktur	dr. Hasti Wulandari
2.	Kepala Bagian Tata Usaha	Tri Hariyanti, SKM., MM.
	a. Kepala Sub bagian Perencanaan dan Keuangan	Merita Sulistyoningrum, SE.
	b. Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian	Muginah, SE.,MM.
3.	Kepala Bidang Pelayanan dan Penunjang Medik	dr. RR Gita Febri Irianti.
	a. Kepala Seksi Pelayanan Medik	dr. Rakrsyma Lembayung Puri.
	b. Kepala Seksi Penunjang Medik	Sri Heri Ambarwati, SKM., MM.
4.	Kepala Bidang Keperawatan dan Penunjang Non Medik	Bambang Purwantoro, S.Kep., Ns., M.Kes.
	a. Kepala Seksi Keperawatan	Sudrisman, S.Kep., Ns.
	b. Kepala Seksi Penunjang Non Medik	Tri Wahyuningsih, S.Kep., Ns.
5.	Kepala Bidang sarana dan sanitasi	Gozi, SKM., MM.
	a. Kepala Seksi Sa	Saul Wisnu Pamungkas, SKM., MM.
	b. Kepala Seksi Sanitasi	Kartini Sulistyoningsih, SKM., M.Kes.
6.	Kelompok Jabatan Fungsional	

### 4) Struktur Kepegawaian/SDM RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo sebagai berikut:

Rumah Sakit Umum Daerah dr. Gunawan Mangunkusumo Kabupaten Semarang di dukung dengan SDM sebanyak 576 karyawan yang terdiri dari terdiri 402 PNS, 170 BLUD dan 3 dokter Mitra, 1 dokter PTTD dengan rincian sebagai berikut:

# RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. GUNAWAN MANGUNKUSUMO CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DENGAN ANGKA PEMBANDING TAHUN 2020

(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh)

### 1. UMUM (lanjutan)

#### d. Susunan Dewan Pengawas, Pengurus dan Struktur Organisasi (lanjutan)

#### 4) Struktur Kepegawaian/SDM RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo sebagai berikut: (lanjutan)

	JENIS	SATUAN	JUMLAH			
NO			ASN	BLUD/ MITRA	TOTAL	
1	Tenaga Struktural	orang	13		13	
2	Tenaga Medis	orang	31	8	39	
3	Tenaga Paramedis Keperawatan	orang	191	103	294	
4	Tenga Paramedis Non Keperawatan	orang	84	24	108	
5	Tenaga Non Medis	orang	83	39	122	
	Jumlah		402	174	576	

### 5) Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan Hukum yang mendasari penyusunan laporan keuangan RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan, Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5679);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU);
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor.61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU);

(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh)

#### 1. UMUM (lanjutan)

#### d. Susunan Dewan Pengawas, Pengurus dan Struktur Organisasi (lanjutan)

#### 5) Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan (lanjutan)

- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor.55 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
- 12) Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) No.79 Tahun 2018 Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Tentang Badan Layanan Umum Daerah Ditetapkan pada tanggal 27 Agustus 2018.

### 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG DITERAPKAN

RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo menjadi BLUD dengan status penuh berdasarkan kepada Keputusan Bupati Nomor 445/0529/2011 tanggal 27 Oktober 2011 Tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Dengan Status Penuh Kepada RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo Kabupaten Semarang. Kebijakan akuntansi yang berlaku di BLUD RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo diatur dalam Peraturan Direktur Nomor: 800/3188/2016, tanggal 7 November 2016, Tentang Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud adalah prinsip akuntansi spesifik dan metode penerapan prinsip tersebut digunakan sebagai dasar dalam pendefenisian/ pengertian, pengukuran/penilaian, pengakuan, dan penyajian.

Prinsip-prinsip akuntansi penting yang telah diterapkan secara taat dan konsisten dalam penyajian laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

#### a. Sistem Akuntansi Keuangan

Sistem Akuntansi Keuangan adalah sistem akuntansi yang menghasilkan laporan keuangan pokok dengan tujuan umum (*general purpose* ), sebagai berikut :

- 1. Akuntabilitas; mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan pelayanan kesehatan yang dipercayakan kepada RSUD dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
- 2. Manajemen; membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan RSUD dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh penerimaan, pengeluaran, aset, kewajiban, dan ekuitas untuk kepentingan *stakeholders*.
- 3. Transparansi; memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban RSUD dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum berbasis SAP.

#### b. Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, operasional keuangan, arus kas RSUD yang bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan dalam membuat dan mengevaluasi keputusan

Laporan keuangan disusun untuk tujuan umum, yaitu memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna. Namun demikian laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan ekonomi.

#### c. Tanggungjawab Laporan Keuangan

Pimpinan RSUD bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan RSUD yang disertai dengan surat pernyataan tanggung jawab yang berisikan pernyataan bahwa pengelolaan anggaran telah dilaksanakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi keuangan, dan kebenaran isi laporan keuangan merupakan tanggung jawab pimpinan RSUD.

(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh)

#### 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG DITERAPKAN (lanjutan)

#### d. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan rumah sakit dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

RelevanAndal

• Dapat Dibandingkan

Dapat Dipahami

#### e. Asumsi Dasar Akuntansi

Asumsi dasar akuntansi yang diterapkan pada sistem akuntansi RSUD adalah:

#### 1) Kemandirian Entitas

Asumsi kemandirian entitas, yang berarti bahwa RSUD sebagai entitas pelaporan dan entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan RSUD untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh.

RSUD bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang-piutang yang terjadi akibat putusan entitas, serta terlaksana tidaknya program yang telah ditetapkan.

#### 2) Kelangsungan Usaha

Laporan keuangan disusun atas dasar asumsi RSUD terus melakukan usahanya secara berkesinambungan tanpa maksud untuk dibubarkan atau mengurangi secara material skala usahanya.

### 3) Keterukuran Dalam Satuan Uang

Laporan keuangan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

#### 4) Dasar Akuntansi Akrual

Laporan keuangan pada prinsipnya disusun atas dasar akrual, yaitu mengakui transaksi pada saat kejadian bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar dan dicatat dalam periode bersangkutan. Hal ini memberikan informasi kepada pembaca laporan keuangan tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan kas dan pembayaran kas, tetapi juga kewajiban pembayaran kas dimasa mendatang serta sumber daya yang merepresentasikan kas yang akan diterima di masa yang akan datang.

### 5) Substansi Mengungguli Bentuk (Substance Over Form)

Laporan keuangan disusun menggunakan prinsip Substance Over Form (Substansi Mengungguli Bentuk) yang berarti laporan keuangan mencatat suatu peristiwa lebih berdasarkan substansinya daripada legal formalnya.

Misalnya, terdapat aset yang berasal dari dropping APBN atau hibah yang belum ada berita acara serah terima (kepemilikan), tetapi secara de facto dipergunakan dalam operasional pelayanan maka aset tersebut dimasukkan ke dalam laporan keuangan sebagai aset tetap.

#### f. Ciri Dasar Akuntansi

Akuntansi keuangan RSUD merupakan bagian dari akuntansi keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang, karena bukan merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pengelolaan keuangan RSUD menggunakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), dengan ciri yang berbeda dengan akuntansi satuan kerja lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang, yaitu:

(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh)

#### 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG DITERAPKAN (lanjutan)

#### f. Ciri Dasar Akuntansi (lanjutan)

- Dalam rangka pengelolaan kas Rumah Sakit Umum Daerah, RSUD dapat langsung menggunakan pendapatannya tanpa menyetorkan terlebih dahulu ke kas daerah. RSUD juga dapat menyimpan dan mengelola rekening bank, mendapatkan sumber dana untuk menutup defisit dan memanfaatkan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh dana tambahan.
- 2) RSUD diperbolehkan memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa dan/atau transaksi lainnya yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan Rumah Sakit.
- 3) RSUD dapat memiliki utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan peminjaman dengan pihak lain.
- 4) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan RSUD diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
- 5) Konsolidasi dengan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang, disusun menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan.
- 6) RSUD dapat mengalihkan dan/atau menghapus aset tetap dengan/melalui persetujuan pejabat berwenang.
- 7) Periode akuntansi laporan keuangan (tahun buku) Rumah Sakit adalah 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, operasional keuangan, arus kas RSUD yang bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan dalam membuat dan mengevaluasi keputusan ekonomi.

#### g. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

#### Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Pendapatan diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.

Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

### Belanja

Belanja semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh)

#### 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG DITERAPKAN (lanjutan)

#### g. Laporan Realisasi Anggaran (lanjutan)

#### • Belanja (lanjutan)

Belanja diakui saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.

Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan lain-lain.

#### Pembiayaan

Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.

Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

#### h. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

#### i. Neraca

- 1) Tujuan utama neraca adalah menyediakan informasi tentang posisi keuangan RSUD meliputi aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.
- 2) Informasi dalam neraca digunakan bersama-sama dengan informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan lainnya sehingga dapat membantu para pengguna laporan keuangan untuk menilai :
  - Kemampuan RSUD dalam memberikan jasa layanan secara berkelanjutan.
  - Likuiditas dan Solvabilitas.
  - Kebutuhan pendanaan eksternal.

#### 3) Kas Di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan berasal dari penerimaan fungsional yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan yang belum disetorkan ke Kas BLUD per tanggal 31 Desember 2020.

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan.

### 4) Kas Di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang masih dikelola dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa kas yang belum disetor ke Kas BLUD per tanggal 31 Desember 2021.

# DENGAN ANGKA PEMBANDING TAHUN 2020

(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh)

### 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG DITERAPKAN (lanjutan)

#### i. Neraca (lanjutan)

#### 4) Kas Di Bendahara Pengeluaran (lanjutan)

Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran baik uang logam, kertas dan lain-lain kas. Kas di Bendahara Pengeluaran diakui pada saat diterima atau dikeluarkan berdasarkan nilai nominal uang.

#### 5) Investasi Jangka Pendek

Adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas yang artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan beresiko rendah, serta dimiliki selama 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan.

Investasi Jangka Pendek diakui berdasarkan bukti investasi dan dicatat sebesar nilai perolehan. Investasi Jangka Pendek dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

#### 6) Piutang Dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum Daerah

Jumlah uang yang wajib dibayar kepada BLUD RSUD dan/atau hak BLUD RSUD yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.

#### 7) Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional BLUD

Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

Perhitungan penyisihan piutang berdasarkan atas pengolongan kualitas umur piutang terdiri atas kualitas lancar, kualitas kurang lancar, kualitas diragukan dan kualitas macet.

Batasan atas kelompok umur piutang, dikelompokkan atas kelompok umur tahun baik untuk piutang pelayanan, terdiri dari Piutang JKN - Covid 19, Piutang JKN, Piutang Jasa Raharja, Piutang Umum, Piutang JKRS, Piutang Parkir, Piutang AJII, Piutang Askes PT. KAI, Piutang Askes dan Piutang Jamsostek piutang lainnya kecuali untuk di RSU dr. Soetrasno berdasarkan ketentuan kebijakan akuntansi tersendiri di lingkup RSU dr. Soetrasno sebagai BLUD.

Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan PMK No. 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara, Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan sampai dengan Jatuh	0.50%
Kurang Lancar	Kurang Lancar Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan	
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan	100%
	Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan	

#### 8) Beban Dibayar Dimuka

Adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah.

Beban dibayar dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum menimbulkan kewajiban dan diukur berdasarkan jumlah kas yang dikeluaran/ dibayarkan.

DENGAN ANGKA PEMBANDING TAHUN 2020 (Dinyatakan dalam Rupiah Penuh)

#### 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG DITERAPKAN (lanjutan)

### i. Neraca (lanjutan)

#### 9) Persediaan

Persediaan diakui pada saat diterima atau hal kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah. Pada akhir periode akuntansi persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (stock opname).

Persediaan diakui berdasarkan nilai barang yang belum dapat terjual atau terpakai.

Persediaan dinilai berdasarkan harga pembelian terakhir/harga standar, Persediaan merupakan barang pakai habis yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional yang dikelola oleh RSUD dr. R. Soetrasno Rembang, Persediaan dicatat pada akhir periode akuntansi yang dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan.

#### 10) Aset Tetap

Penilaian dan Pengukuran Aset Tetap adalah sebagai berikut:

- Penambahan aset tetap berasal dari belanja modal, belanja barang yang menghasilkan aset tetap, hibah berupa barang modal dan penilaian aktiva tetap yang telah dikuasai tetapi belum memiliki nilai buku. Pengurangan aset tetap bila ada hibah aset tetap kepada pihak ketiga dan ada penghapusan aset tetap;
- Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan termasuk setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut dalam kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan atau siap untuk digunakan/dipakai;
- Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah;
- Aset tetap yang diperoleh dari donasi atau sumbangan/hadiah dinilai berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya pada saat diperoleh dan dikuatkan dengan adanya Berita Acara Penyerahan dari pihak ketiga kepada Pemda;
- Pelepasan aset tetap dapat dilakukan melalui penjualan. Hasil penjualan aset tetap akan diakui seluruhnya sebagai pendapatan;
- Penghapusan aset tetap dilakukan jika aset tetap tersebut rusak berat, usang dan hilang. Penghapusan aset tetap ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Batas jumlah biaya untuk pengeluaran yang harus dikapitalisir sebagai aset tetap dan pengeluaran yang harus dibebankan sebagai belanja, ditentukan dengan menetapkan Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap Barang Milik/Kekayaan Daerah yang meliputi:
  - 1) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin, alat olah raga yang sama dengan, atau lebih dari Rp 300.000,00;
  - 2) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00.
- Barang tidak bergerak dan barang bergerak yang mempunyai Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset sebagaimana di atas dicatat dalam pembukuan (intra komptable) dan menambah aset daerah.
- BM/KD yang mempunyai nilai Aset di bawah Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap dan hewan, ikan, dan tanaman, buku bahan bacaan dicatat di dalam buku inventaris di luar pembukuan (ekstra komptable);
- Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut :
  - 1) Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara bertambah ekonomis/efisien, dan/atau bertambah umur ekonomis, dan/atau, bertambah volume, dan/atau, bertambah kapasitas produksi, dan/atau;
  - 2) Bukan merupakan pemeliharaan yang bersifat rutin;
  - 3) Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

### • Tanah

Tanah diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya pembebasan tanah, belanja untuk memperoleh hak, pengukuran dan belanja penimbunan.

(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh)

#### 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG DITERAPKAN (lanjutan)

#### i. Neraca (lanjutan)

### 10) Aset Tetap (lanjutan)

#### • Peralatan dan Mesin

Mesin dan peralatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh mesin dan alatalat sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya langsung untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.

#### • Peralatan dan Mesin

Mesin dan peralatan yang diperoleh dari dana donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar. Kendaraan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh kendaraan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, beaya balik nama dan biaya langsung lainnya. Untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.

Kendaraan yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar/harga gantinya mebelair dan perlengkapan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset teresbut sehingga dapat digunakan. Mebelair dan perlengkapan yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar.

#### · Gedung dan Bangunan

Gedung diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membengun gedung dan bangunan sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga beli atau biaya konstruksi, biaya pembebasan tanah, harga penggusuran IMB notaris dan pajak.

### • Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan dan jembatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membengun jalan dan jembatan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya lain-lain sampai dengan jalan dan jembatan tersebut siap untuk digunakan.

Instalasi dan jaringan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun instalasi dan jaringan sampai dengan siap untuk digunakan.

Bangunan air diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun irigasi sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya-biaya lain sampai dengan irigasi tersebut siap digunakan.

### • Konstruksi dalam Pengerjaan

Biaya konstruksi yang dicakup oleh suatu kontrak konstruksi akan meliputi harga kontrak ditambah dengan biaya tidak langsung lainnya yang dilakukan sehubungan dengan konstruksi dan dibayar pada pihak selain dari kontraktor. Biaya ini juga mencakup biaya bagian dari pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola, jika ada konstruksi dalam pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

#### • Biaya Penyusutan dan Akumulasi Penyusutan

Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (straight line method). Nilai penyusutan untuk masing-masing periode (merupakan nilai penyusutan untuk aset tetap suatu periode yang dihitung tiap bulan) diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.

# RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. GUNAWAN MANGUNKUSUMO CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DENGAN ANGKA PEMBANDING TAHUN 2020

(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh)

#### 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG DITERAPKAN (lanjutan)

#### i. Neraca (lanjutan)

### 10) Aset Tetap (lanjutan)

### • Biaya Penyusutan dan Akumulasi Penyusutan (lanjutan)

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penusutan dan dicatat pada akumulasi penyusutan aset tetap sebagai pengurang nilai aset tetap. Masa manfaat aset tetap terlihat dalam tabel dibawah ini:

Aset Tetap	Umur Ekonomis (tahun)
Tanah	-
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 Tahun
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 Tahun
Jalan, Jaringan & Irigasi	5 s.d. 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya	4 Tahun
Kontruksi dalam Penyelesaian	-

#### • Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Suatu aset tetap dan akumulasi penyusutannya dieleminasi dari neraca dan diungkapkan dalam CALK ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan dianggap tidak memiliki manfaat ekonomi/sosial signifikan di masa yang akan datang setelah ada Keputusan Kepala Daerah.

#### 11) Aset Lainnya dan Aset Tidak Berwujud

Aset lainnya dan Aset Tidak Berwujud terdiri dari aset tidak berwujud yang adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki dan digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya.

Termasuk di dalam Aset Lainnya adalah:

- 1. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;
- 2. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
- 3. Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
- 4. Aset Lain-lain.

#### 12) Kewajiban Jangka Pendek

Bagian lancar kewajiban jangka panjang diakui pada saat periode berjalan atau berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa pembayaran bagian lancar kewajiban jangka panjang yang telah diakui dalam periode berjalan.

Kewajiban jangka pendek diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar.

Yang masuk dalam akun kewajiban jangka pendek adalah :

- 1. Bagian Lancar Utang Jangka Pendek
- 2. Utang Beban

#### 13) Pinjaman Jangka Pendek

Kewajiban diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan kewajiban yang telah diakui dalam periode berjalan. Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk utang adalah sebesar jumlah yang belum dibayar RSUD yang akan jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan.

#### 14) Ekuitas Dana

Adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan.

DENGAN ANGKA PEMBANDING TAHUN 2020 (Dinyatakan dalam Rupiah Penuh)

#### 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG DITERAPKAN (lanjutan)

#### i. Neraca (lanjutan)

#### 14) Ekuitas Dana (lanjutan)

Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) yang dihitung dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

#### j. Laporan Operasional (LO)

- Laporan Operasional menyajikan informasi tentang operasi RSUD mengenai sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh RSUD. Laporan operasional antara lain dapat berupa laporan aktivitas atau laporan suplus/defisit.
- 2) Informasi dalam laporan operasional, digunakan bersama-sama dengan informasi yang diungkapkan dalam komponen laporan keuangan lainnya sehingga dapat membantu para pengguna laporan keuangan untuk:
  - Mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi.
  - Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi.
  - Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja RSUD dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

#### k. Laporan Arus Kas

- 1) Tujuan utama laporan arus kas adalah menyediakan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus kas dikelompokan dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.
- 2) Informasi dalam laporan arus kas digunakan bersama-sama dengan informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan lainnya sehingga dapat membantu para pengguna laporan keuangan untuk menilai :
  - Kemampuan RSUD dalam menghasilkan kas dan setara kas.
  - Sumber dana RSUD
  - Penggunaan dana RSUD
  - Prediksi kemampuan RSUD untuk memperoleh sumber dana serta penggunaannya untuk masa yang akan datang.

Komponen pelaporan Arus Kas terdiri dari tiga komponen yaitu :

- · Arus Kas dari Aktivitas Operasi;
- · Arus Kas dari Aktivitas Investasi;
- Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan;

### I. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.

### m. Catatan Atas Laporan Keuangan

Tujuan utama penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) adalah menyajikan informasi tentang penjelasan terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realiasi Anggaran/Laporan Operasional, Neraca, dan Laporan Arus Kas dalam rangka pengungkapan yang memadai.

(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh)

# 3. KONSOLIDASI LAPORAN KEUANGAN RSUD KE DALAM LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

RSUD menyusun laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). RSUD merupakan satker pemerintah daerah, oleh karena itu laporan keuangan RSUD dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang. Konsolidasi laporan keuangan dapat dilakukan jika digunakan prinsip akuntansi yang sama.

RSUD menggunakan SAP begitu pula laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang menggunakan SAP, karena itu akan digunakan mapping atau konversi kode rekening BLUD untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Sistem akuntansi RSUD memproses semua pendapatan dan belanja RSUD, baik yang bersumber dari pendapatan usaha dari jasa layanan, hibah, pendapatan APBD/N, dan pendapatan usaha lainnya. Sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dari sistem akuntansi tersebut mencakup seluruh transaksi keuangan pada RSUD.

Transaksi keuangan RSUD yang bersumber dari pendapatan usaha dari jasa layanan, hibah, pendapatan APBD/N, dan pendapatan usaha lainnya wajib dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Semarang.

Pos-pos neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas juga dikonsolidasikan ke neraca Pemerintah Kabupaten Semarang. Untuk tujuan ini perlu dilakukan reklasifikasi atau konversi pos-pos neraca agar sesuai dengan SAP dengan menggunakan Bagan Akun Standar (BAS) yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Proses konversinya mencakup pengertian, klasifikasi, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan atas akun-akun neraca dan laporan aktivitas/operasi.

#### 4. PENERAPAN PSAP NOMOR 13

Laporan Keuangan Rumah Sakit disajikan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 13 yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan. Penyusunan dan penyajian atas laporan keuangan berdasarkan dasar pengukuran dan pengakuan laporan keuangan adalah *Accrual Basis*. Laporan keuangan Rumah Sakit menggunakan mata uang rupiah penuh. Pada tanggal neraca aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dijabarkan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. Keuntungan dan kerugian yang timbul sebagai akibat dari penjabaran aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dicatat dalam laporan laba rugi tahun berjalan. Laporan Arus Kas disusun dengan menggunakan metode langsung yang menyajikan informasi perubahan historis atas penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan selama satu periode.

### RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. GUNAWAN MANGUNKUSUMO LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DENGAN ANGKA PEMBANDING 2020

(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh)

#### 5 PENDAPATAN - LRA

Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut :

	2021 Anggaran	2021 Realisasi	% Terhadap Anggaran	2020 Realisasi
Pendapatan Jasa Layanan	89,819,392,000	182,534,500,219	203.22%	89,497,306,922
Pendapatan Hasil Kerjasama	-	-	0.00%	-
Pendapatan Hibah	-	-	0.00%	-
Pendapatan APBN	-	-	0.00%	-
Pendapatan APBD	-	-	0.00%	-
Pendapatan Usaha Lainnya	774,813,000	2,044,487,923	263.87%	1,629,833,605
JUMLAH PENDAPATAN	90,594,205,000	184,578,988,142	203.74%	91,127,140,527
			kk	

<sup>1.</sup> Pendapatan Jasa Layanan adalah pendapatan yang didapat dari jasa layanan RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo tercapai sebesar 203,22% dari target anggaran pendapatan sebesar Rp.182.534.500.219,-

2. Pendapatan Usaha Lainnya terealisasi sebesar 263,87% dari target sebesar Rp.2.044.487.923,- terdiri dari:

No	Uraian	2021	2020	%
1.	Diklat	1,350,413,000	746,540,500	180.89%
2.	Jasa Giro	437,092,923	558,906,105	78.21%
3.	Sewa Gedung	129,000,000	59,500,000	216.81%
4.	Parkir	124,712,000	258,354,000	48.27%
5.	Fotocopy	670,000	1,871,500	35.80%
6.	Lain-lain	2,600,000	4,661,500	55.78%
Jumlah Pendapatan Usaha Lainnya		2,044,487,923	1,629,833,605	125.44%

### 6. BELANJA - LRA

Rincian estimasi Belanja dan realisasinya adalah sebagai berikut :

### a. Belanja Pegawai

	2021 Anggaran	2021 Realisasi	% Terhadap Anggaran	2020 Realisasi
BLUD	32,193,049,000	27,760,285,118	86.23%	6,174,493,846
Jumlah Belanja Pegawai	32,193,049,000	27,760,285,118	86.23%	6,174,493,846

Belanja Pegawai - BLUD sebesar Rp.27.760.285.118,- terealisasi sebesar 86,23% dari anggaran Rp.32.193.049.000,-.

### b. Belanja Barang dan Jasa

	2021 Anggaran	2021 Realisasi	% Terhadap Anggaran	2020 Realisasi
BLUD	61,294,217,000	58,147,097,830	94.87%	68,413,724,499
Jumlah Belanja Barang dan Jasa	61,294,217,000	58,147,097,830	94.87%	68,413,724,499

### RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. GUNAWAN MANGUNKUSUMO LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DENGAN ANGKA PEMBANDING 2020

(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh)

Belanja Barang dan Jasa - BLUD Rp.58.147.097.830,- terealisasi sebesar 94,87~% dari anggarannya sebesar Rp.61.294.217.000,-.

### RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. GUNAWAN MANGUNKUSUMO LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DENGAN ANGKA PEMBANDING 2020

(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh)

### 6. BELANJA - LRA (lanjutan)

### c. Belanja Modal

### • Peralatan dan Mesin

	2021 Anggaran	2021 Realisasi	% Terhadap Anggaran	2020 Realisasi
BLUD	6,732,008,000	2,713,770,464	40.31%	7,723,223,919
Jumlah Peralatan dan Mesin	6,732,008,000	2,713,770,464	40.31%	7,723,223,919

### • Gedung dan Bangunan

	2021 Anggaran	2021 Realisasi	% Terhadap Anggaran	2020 Realisasi
BLUD	4,930,200,000	4,577,168,250	92.84%	4,915,565,000
Jumlah Gedung dan Bangunan	4,930,200,000	4,577,168,250	92.84%	4,915,565,000

No	Uraian	2021 Anggaran	2021 Realisasi	%
1.	Alat-alat Bantu	4,000,000	-	0.00%
2.	Alat Kantor / ART	637,876,000	541,117,960	84.83%
3.	Alat Kedokteran	6,090,132,000	2,172,652,504	35.67%
4.	Gedung dan Bangunan	4,930,200,000	4,577,168,250	92.84%
Jun	nlah Belanja Modal	11,662,208,000	7,290,938,714	62.52%

Belanja Modal bersumber dari dana BLUD terealisasi sebesar Rp. 7.290.938.714,- atau *equivalent* dengan 62,52% dari anggaran sebesar Rp.11.662.208.000,- yang terdiri dari :

	2021 Anggaran	2021 Realisasi	% Terhadap Anggaran	2020 Realisasi
Belanja Modal - BLUD				
Peralatan dan Mesin	6,732,008,000	2,713,770,464	40.31%	7,723,223,919
<ul> <li>Gedung dan Bangunan</li> </ul>	4,930,200,000	4,577,168,250	92.84%	4,915,565,000
Jumlah Belanja Modal BLUD	11,662,208,000	7,290,938,714	62.52%	12,638,788,919
Jumlah Belanja Modal	11,662,208,000	7,290,938,714	62.52%	12,638,788,919
JUMLAH BELANJA - LRA	105,149,474,000	93,198,321,662	88.63%	87,227,007,264

(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh)

#### 7. KAS DAN SETARA KAS

Merupakan saldo kas dan setara kas pada tanggal neraca dengan rincian sebagai berikut:

	2021	2020
KAS		
Kas di Bendahara Penerimaan	41,800,760	30,631,400
Kas Lainnya	-	6,129,750
Jumlah Kas	41,800,760	36,761,150
BANK	2021	2020
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah		
Cab Ungaran No. Rek. 1-022-00414-6	104,853,096,054	13,862,635,807
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk No. Rek. 0513-01-000117-30-3	699,361,103	469,922,087
PT Bank Mandiri Tbk KCP Ambarawa No. Rek. 136-00-1102900-3	341,676,966	193,730,059
Jumlah Bank	105,894,134,123	14,526,287,953
JUMLAH KAS DAN SETARA KAS	105,935,934,883	14,563,049,103

Saldo Kas pada BLUD RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo per 31 Desember 2021 sebesar Rp.105.894.134.123,- (Seratus lima milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta seratus tiga puluh empat ribu seratus dua puluh tiga rupiah) terdiri dari:

a) Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp. 41.800.760,- uraiannya adalah sebagai berikut:

No	Tunai / Saldo Bank	No dan Nama Rekening	Saldo 31/12/2021
1	Tunai	Pendapatan tanggal 31 Desember 2021 yang disetor tanggal 3 Januari 2022	41,800,760

b) Kas di Bendahara Pengeluaran (Saldo di Bank) sebesar Rp.105.894.134.123,-. Dengan uraian sebagai berikut:

No	Tunai / Saldo Bank	No dan Nama Rekening	Saldo 31/12/2021
1	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	(1022004146) BLUD RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo	104,853,096,054
2	PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk.	(051301000117303) BLUD RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo	699,361,103
3	PT Bank Mandiri Tbk	(1360011029003) BLUD RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo	341,676,966
	Jun	nlah Setara Kas	105,894,134,123

### 8. PIUTANG DARI KEGIATAN OPERASIONAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Saldo Piutang Dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum Daerah per 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut :

_	2021	2020
a) Piutang Pasien BPJS	4,714,840,216	3,297,978,239
b) Piutang Pasien Umum	306,927,597	306,927,597
c) Piutang kepada Perusahaan	185,315,739	126,186,955
d) Piutang Pasien Jamkesda	110,089,202	-
e) Piutang Lain	1,755,875,000	33,525,017,771
JUMLAH PIUTANG DARI KEGIATAN OPERASIONAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH	7,073,047,754	37,256,110,562

Piutang Piutang Dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum Daerah adalah hak yang timbul dari penyerahan barang atau jasa dalam rangka kegiatan operasional RSUD. Untuk Piutang Dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum Daerah (pelayanan pasien umum) diakui dan dicatat setelah barang atau jasa diserahkan dan dibuatkan tagihannya pada saat pasien akan meninggalkan rumah sakit, dan belum diterima pembayaran dari penyerahan tersebut. Sementara Piutang usaha atas pelayanan pasien dengan penjamin (BPJS dan COVID-19) diakui dan dicatat pada saat tagihan selesai dilakukan verifikasi dan klaim telah diajukan.

# (Dinyatakan dalam Rupiah Penuh)

# 8. PIUTANG DARI KEGIATAN OPERASIONAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (lanjutan)

### a) Piutang Pasien BPJS

			20	)20
No	Uraian	2021	Berasal dari Klaim di	Berasal dari Klaim di
			Tahun 2020	Tahun 2019
1.	Klaim Bulan Januari	-	2,788,917,600	-
2.	Klaim Bulan Februari	-	1,902,500	-
3.	Klaim Bulan Mei	-	1,585,400	-
4.	Klaim Bulan Juli	-	49,896,000	-
5.	Klaim Bulan Agustus		86,486,400	-
6.	Klaim Bulan September		48,127,700	1,902,500
7.	Klaim Bulan Oktober	4,714,840,216	131,773,000	5,390,400
8.	Klaim Bulan November		-	5,707,500
9.	Klaim Bulan Desember		174,133,839	2,155,400
	Jumlah Piutang	4,714,840,216	3,282,822,439	15,155,800

 2021
 2020

 Piutang Pasien BPJS
 4,714,840,216
 3,297,978,239

### b) Piutang Pasien Umum

No	Uraian	2021	2020	Mutasi
1.	Berasal dari tahun 2010	119,590,350	119,590,350	-
2.	Berasal dari tahun 2011	-	ı	•
3.	Berasal dari tahun 2012	52,926,850	52,926,850	•
4.	Berasal dari tahun 2013	17,107,600	17,107,600	-
5.	Berasal dari tahun 2014	14,125,200	14,125,200	•
6.	Berasal dari tahun 2015	9,691,400	9,691,400	-
7.	Berasal dari tahun 2016	40,144,050	40,144,050	•
8.	Berasal dari tahun 2017	9,258,900	9,258,900	-
9.	Berasal dari tahun 2018	15,777,700	15,777,700	-
10.	Berasal dari tahun 2019	180,800	180,800	-
11.	Berasal dari tahun 2020	28,124,747	28,124,747	-
	Jumlah Piutang	306,927,597	306,927,597	-

Sampai dengan 31 Desember 2021 tidak ada Piutang Pasien Umum kurun waktu 2010 sampai dengan 2020 yang terbayarkan.

### c) Piutang kepada Perusahaan

No	Jenis Piutang / Nama Debitur	2021	2020	%
1	PT Jasa Raharja	86,956,430	692,008	12465.81%
2	Trauma Center	26,739,780	104,025,447	-74.29%
3	PT. KAI	25,019,229	-	100.00%
4	PT. Matrix Global	12,517,300	12,517,300	0.00%
5	PT. Pinako	660,600	2,979,900	-77.83%
6	PT. Yakes Telkom	122,500	-	100.00%
7	PT BNI Life Insurance	3,410,800	-	100.00%
8	RSUD dr. Gondo Suwarno Kabupaten Semarang	29,500,000	-	100.00%
9	PT Dusun Semilir Bawen	389,100	-	100.00%
10	Hardlent	-	172,300	-100.00%
11	Universitas Pembangunan Nasional	-	5,800,000	-100.00%
	Jumlah Piutang Perusahaan	185,315,739	126,186,955	46.86%

(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh)

### 8. PIUTANG DARI KEGIATAN OPERASIONAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (lanjutan)

#### d) Piutang Pasien Jamkesda

•	2021	2020
Piutang Pasien Jamkesda	110,089,202	-
Jumlah Piutang Pasien Jamkesda	110,089,202	-

Piutang Pasien Jamkesda di 31 Desember 2021 adalah atas klaim bulan November 2021 (Rp.110.089.202,-) sedangkan 2020 nilai saldonya nihil.

### e) Piutang Lain

Piutang Lain adalah Piutang atas kegiatan layanan terkait penanganan Covid-19, rinciannya adalah sebagai berikut:

No	Jenis Piutang / Nama Debitur	2021	2020
1	Klaim Covid-19 Tahap XVII	1,734,838,400	-
2	Klaim Covid-19 Tahap XVIII	20,703,700	-
3	Klaim Dispute Kemenkes	332,900	-
	Klaim Covid-19 Tahap IV (Juli - Agt 2020)	•	(144,719,000)
	Klaim Covid-19 Tahap V (Juli - Sep 2020)		2,339,021,600
	Klaim Covid-19 Tahap VI (Oktober 2020)		5,732,060,200
7.	Klaim Covid-19 Tahap VII (November 2020)		14,105,841,500
8.	Klaim Covid-19 Tahap VIII (Desember 2020)		11,488,925,800
9	Sewa ruangan untuk kantor kas		3,887,671
	Jumlah Piutang Perusahaan	1,755,875,000	33,525,017,771

Sampai dengan 31 Desember 2021 sisa klaim Covid-19 yang belum terbayarkan adalah sebesar Rp.1.755.875.000,-.

### 9. PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH - PIUTANG DARI KEGIATAN OPERASIONAL BLUD

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih- Piutang dari Kegiatan Operasional BLU per 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut :

		2021	
Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
0 - 4 Bulan	>4 - 8 Bulan	>8 - 12 Bulan	>12 Bulan
4,714,840,216	-	-	-
-	-	-	306,927,597
172,798,439	-	-	12,517,300
110,089,202	-	-	-
1,755,875,000	-	-	-
6,753,602,857	-	-	319,444,897
Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
0.50%	10%	50%	100%
23,574,201	-	-	-
-	-	-	306,927,597
863,992	-	-	12,517,300
550,446	-	-	-
8,779,375	-	-	-
33,768,014	-	-	319,444,897
	0 - 4 Bulan  4,714,840,216 - 172,798,439 110,089,202 1,755,875,000 6,753,602,857  Lancar 0.50% 23,574,201 - 863,992 550,446 8,779,375	Lancar	0 - 4 Bulan         >4 - 8 Bulan         >8 - 12 Bulan           4,714,840,216         -         -           -         -         -           172,798,439         -         -           110,089,202         -         -           1,755,875,000         -         -           6,753,602,857         -         -           Lancar         Kurang Lancar         Diragukan           0.50%         10%         50%           23,574,201         -         -           -         -         -           863,992         -         -           550,446         -         -           8,779,375         -         -

### **DENGAN ANGKA PEMBANDING TAHUN 2020**

(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh)

### 9. PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH - PIUTANG DARI KEGIATAN OPERASIONAL BLUD (lanjutan)

2020			
Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
0 - 4 Bulan	>4 - 8 Bulan	>8 - 12 Bulan	>12 Bulan
3,297,978,239	-	-	-
28,124,747	-	-	278,802,850
113,497,355	-	-	12,689,600
-	-	-	-
33,525,017,771	-	<u> </u>	-
36,964,618,112	-		291,492,450
Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
0.50%	10%	50%	100%
16,489,891	-	-	-
140,624	-	-	278,802,850
567,487	-	-	12,689,600
-	-	-	-
167,625,089	-	-	-
184,823,091	=	-	291,492,450
	0 - 4 Bulan  3,297,978,239 28,124,747 113,497,355 - 33,525,017,771 36,964,618,112  Lancar 0.50% 16,489,891 140,624 567,487 - 167,625,089	Lancar	Lancar 0 - 4 Bulan         Kurang Lancar >8 - 12 Bulan           3,297,978,239         -           28,124,747         -           113,497,355         -           -         -           33,525,017,771         -           36,964,618,112         -           Lancar 0,50%         Kurang Lancar 10%           16,489,891         -           140,624         -           567,487         -           -         -           167,625,089         -

Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional BLUD merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing debitur. Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Operasional BLUD per 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar Rp.123.102.629,-.

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional BLU adalah sebagai berikut :

476,315,540 (184,854,766) 61,752,138 353,212,911	378,948,736 (87,807,771) 185,174,575 <b>476,315,540</b>
61,752,138	185,174,575
353,212,911	476,315,540
2021	2020
,076,206,182	2,726,168,821
534,881,366	579,804,939
	70,720,749
76,232,274	
	76,232,274

Saldo Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah Rp.2.687.319.823,- dan Rp.3.376.694.509,- yang terdiri dari:

### **DENGAN ANGKA PEMBANDING TAHUN 2020**

(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh)

#### 10. PERSEDIAAN (lanjutan)

. PERSEDIAAN (lanjutan )	
2021	2020
a) Persediaan Bahan Medis	
Habis Pakai Kesehatan Medis 36,256,017	14,456,072
Habis Pakai Kesehatan Medis CSSD 50,891,256	28,232,257
Obat dan BHP Umum 488,895,257	726,669,529
Obat dan BHP BPJS 1,124,668,778	1,280,964,258
Obat Hibah 273,978,169	537,569,628
Obat Hibah Vaksin HB O 4,684,251	2,329,327
BHP Radiologi Umum 44,530,042	64,938,931
BHP Radiologi BPJS 52,302,413	71,008,819
Jumlah Persediaan Bahan Medis 2,076,206,182	2,726,168,821
b) Persediaan Reagen Dan BHP Bank Darah Umum	
Reagen dan BHP Bank Darah Umum 18,907,336	17,149,470
Reagen dan BHP Bank Darah BPJS 318,780	6,656,892
Reagen dan BHP Laborat Umum 225,351,230	162,982,839
Reagen dan BHP Laborat BPJS 283,597,782	381,993,256
Hibah Reagen dan Laborat 5,031,239	10,687,482
Darah BPJS 1,675,000	335,000
Jumlah Persediaan Reagen dan BHP Bank Daerah Umum 534,881,366	579,804,939
c) Persediaan Bahan Non Medis	
Perlengkapan Ruang Pasien 4,767,000	8,249,500
Habis Pakai ATK 14,121,110	9,526,950
Habis Pakai Cetakan 15,523,150	17,959,500
Habis Pakai Kebersihan 10,468,200	9,258,059
Habis Pakai Kesehatan Non Medis 12,651,100	9,480,684
Habis Pakai Alat Listrik 1,727,150	1,742,700
Bahan Makan Pasien Kering 16,974,564	14,503,356
Jumlah Persediaan Bahan Non Medis 76,232,274	70,720,749
JUMLAH PERSEDIAAN 2,687,319,823	3,376,694,509

Persediaan adalah aset yang diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam proses pemberian pelayanan, atau dalam bentuk bahan atau perlengkapan (supplies) untuk digunakan dalam proses pemberian pelayanan dan kegiatan pendukung dalam memberikan pelayanan. Persediaan terdiri atas obat-obatan dan alat kesehatan, bahan makanan kering, bahan dan alat kesehatan laboratorium, bahan dan alat kesehatan radiologi, alat listrik, alat kebersihan, barang cetakan, bahan habis pakai kantor dan lainlain.

#### 11. BIAYA DIBAYAR DIMUKA

Saldo Biaya Dibayar di Muka per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	2021	2020
Biaya Dibayar di Muka	140,995,048	75,026,466
Jumlah Biaya Dibayar di Muka	140,995,048	75,026,466

Biaya Dibayar di Muka sebesar Rp.140.995.048,- yang merupakan biaya Asuransi-Asuransi Profesi Dokter yang berlaku mulai 1 Desember 2021 sampai dengan 30 November 2022 sebesar Rp.76.014.740,- dan Asuransi Barang Milik Daerah yang berupa Asuransi Gedung dan Asuransi Kendaraan Bermotor berlaku mulai 20 September 2021 sampai dengan 20 September 2022 sebesar Rp.64.980.308,-.

(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh)

### 12. ASET TETAP

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut:

	2021			
Harga Perolehan	Saldo Awal	Penambahan	Reklasifikasi	Saldo akhir
Tanah	1,461,250,000	-	-	1,461,250,000
Peralatan dan Mesin	105,912,597,900	16,706,482,685	4,548,033,563	118,071,047,022
Gedung dan Bangunan	89,958,963,494	4,577,168,250	159,807,500	94,376,324,244
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5,451,870,337	140,724,000	(72,500,000)	5,665,094,337
Aset Tetap Lainnya	97,940,000	-	-	97,940,000
Jumlah Harga Perolehan	202,882,621,731	21,424,374,935	4,635,341,063	219,671,655,603
Akumulasi Penyusutan				
Akumulasi Penyusutan	(64,768,934,329)	(11,162,908,116)	(3,895,808,139)	(72,036,034,306)
Jumlah Akumulasi Penyusutan	(64,768,934,329)	(11,162,908,116)	(3,895,808,139)	(72,036,034,306)
Nilai Buku	138,113,687,402			147,635,621,297
		2020		
Harga Perolehan	Saldo Awal	Penambahan	Reklasifikasi	Saldo akhir
Tanah	1,461,250,000	-	-	1,461,250,000
Peralatan dan Mesin	77,312,713,951	29,122,669,412	522,785,463	105,912,597,900
Gedung dan Bangunan	85,103,398,494	4,855,565,000	-	89,958,963,494
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5,326,157,387	125,712,950	-	5,451,870,337
Aset Tetap Lainnya	97,940,000	-	-	97,940,000
Jumlah Harga Perolehan	169,301,459,832	34,103,947,362	522,785,463	202,882,621,731
Akumulasi Penyusutan				
Akumulasi Penyusutan	(54,354,686,641)	10,263,616,966	(150,630,722)	(64,768,934,329)
Jumlah Akumulasi Penyusutan	(54,354,686,641)	10,263,616,966	(150,630,722)	(64,768,934,329)
Nilai Buku	114,946,773,191			138,113,687,402
		_	2021	2020
Beban Penyusutan dan Amortisas	i Menurut LO			
Beban Penyusutan Peralatan dan N			7,289,317,248	6,472,513,573
Beban Penyusutan Gedung dan Ba	· ·		3,604,897,135	3,418,263,694
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, da	an Jaringan		268,693,733	263,064,773
Jumlah Beban Penyusutan Dan An	nortisasi	_	11,162,908,116	10,153,842,040

(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh)

#### 13. ASET LAINNYA

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut:

	2021	2020
Aset Tak Berwujud	71.185.000	101,185,000
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(90,389,500)	(86,791,000)
Aset Lainnya	164,536,843	116,641,203
Jumlah Aset Tidak Berwujud	145,332,343	131,035,203

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.145.332.343,- dan Rp.131.035.203,- yang terdiri dari saldo Aset Tak Berwujud berupa *Software* yang digunakan untuk menunjang operasional rumah sakit.

Biaya Amortisasi Aset Tidak Berwujud selama tahun 2021 adalah sebesar Rp.3.598.500,- yang menambah akumulasi amortisasi aset tidak berwujud menjadi Rp.90.389.500,-.

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 merupakan Detail Enginering Desain (DED) dengan rincian sebagai berikut:

	2021	2020
Detail Engenering Desain (DED)	164,536,843	116,641,203
Jumlah	164,536,843	116,641,203

#### 14. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari fihak ketiga, utang perhitungan fihak ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang. Adapun rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut:

ш	to	n	~
u	La	ш	ч

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	39,453,532,107	22,536,987,800
f) Pendpatan Diterima Dimuka	35,860,274	5,178,082
e) Utang Jangka Pendek Lainnya	-	7,780,700
d) Utang Pembayaran Jasa Pelayanan	11,278,528,765	19,636,138,110
c) Utang Lainnya	119,590,350	119,590,350
b) Utang Belanja Barang dan Jasa	878,213,718	2,768,300,558
a) Utang Belanja Pegawai	27,141,339,000	-
- · · J		

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh)

### 14. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK (lanjutan)

Adapun rincian Utang per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 disajikan sebagai berikut:

	2021	2020
a) Utang Belanja Pegawai		
Utang TPP Bulan Desember 2021	611,585,000	-
Utang Kekurangan Gaji 2021	8,181,700	-
Utang Jasa Pelayanan Umum Desember 2021	518,914,761	-
Utang Jasa Pelayanan Umum MCU Desember 2021	130,594,763	-
Utang Jasa Pelayanan BPJS Desember 2021	1,185,869,804	-
Utang Jasa Pelayanan BPJS Agustus Pending 2021	220,136	-
Utang Jasa Pelayanan BPJS Oktober Pending 2021	45,076,304.00	-
Utang Jasa Pelayanan BPJS November Pending 2021	40,252,688.00	-
Utang Jasa Pelayanan BPJS Agustus Pending 2021	3,364,729,795.00	-
Utang Jasa Pelayanan COVID - 19 IX	3,931,449,340.00	-
Utang Jasa Pelayanan COVID - 19 X	2,467,200,078.00	-
Utang Jasa Pelayanan COVID - 19 XI	2,581,971,896.00	-
Utang Jasa Pelayanan COVID - 19 XII	5,271,549,482.00	-
Utang Jasa Pelayanan COVID - 19 XIII	4,602,922,138.00	-
Utang Jasa Pelayanan COVID - 19 XIV	1,532,211,625.00	-
Utang Jasa Pelayanan COVID - 19 XV	99,585,787.00	-
Utang Jasa Pelayanan COVID - 19 XVI	430,282,990.00	-
Utang Jasa Pelayanan COVID - 19 XVIII (Belum Verif)	5,072,407.00	-
Utang Jasa Pelayanan COVID - 19 Klaim dispute	313,668,306.00	-
Jumlah Utang Belanja Pegawai	27,141,339,000	-
b) Utang Belanja Barang dan Jasa		
Utang Obat 2021	270,433,207	2,239,084,435
Utang BHP 2021	226,648,129	39,899,360
Utang Darah Bulan Desember 2021	4,400,000	43,625,000
Utang Gas Medis Bulan Desember 2021	60,409,080	80,890,360
Utang Bahan Kimia bulan Desember 2021	112,785,299	41,003,600
Utang Listrik Bulan Desember 2021	119,828,736	-
Utang Telepon bulan esember 2021	2,450,621	_
Utang Air bulan Desember 2021	8,526,720	_
Utang Jasa Pihak ke tiga bulan Desember	34,919,696	197,235,442
Utang Makanan Minuman Pasien Bulan Desember	22,279,350	-
Utang BHP Non Medis	15,532,880	_
Utang Sewa bulan Desember 2020	-	15,000,000
Utang ATK Bulan desember 2020	_	901,700
Utang Listrik Telpon Air bulan Desember 2020	_	110,660,661
Grang Eleant Telperit in Salari Bessinser Eses		
Jumlah Utang Belanja Barang dan Jasa	878,213,718	2,768,300,558
	2021	2020
c) Utang Lainnya		
Kewajiban Kepada Daerah	119,590,350	119,590,350
Jumlah Utang Lainnya	119,590,350	119,590,350

(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh)

### 14. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK (lanjutan)

. NEWAJIDAN JANGKA PENDEK (IANJULAN)		
	2021	2020
d) Utang Pembayaran Jasa Pelayanan	00 004 770	00 004 770
Utang Pelayanan Desember 2013	30,304,778	30,304,778
Utang Jasa Pelayanan piutang Umum 2012	19,245,900	19,245,900
Utang Jasa Pelayanan atas piutang umum 2013	6,267,200	6,267,200
Utang Pelayanan piutang umum 20		4,040,400
Utang Jasa pelayanan piutang pasien 2014	4,040,400	
Utang Jasa Pelayanan Umum Desember	117,681,846	416,589,150
Utang Jasa Pelayanan Umum MCU Desember	12,961,737	-
Utang Jasa Pelayanan BPJS Desember	508,229,916	-
Utang Jasa Pelayanan BPJS Agustus Pending 2021	94,344	32,864,832
Utang Jasa Pelayanan BPJS Oktober Pending	19,318,416	50,073,740
Utang Jasa Pelayanan BPJS November Pending 2021	17,251,152	-
Utang Jasa Pelayanan BPJS Desember Pending 2020	-	1,056,667,862
Utang Jasa Pelayanan COVID - 19 IX	1,442,027,055	-
Utang Jasa Pelayanan COVID - 19 X	1,684,906,860	-
Utang Jasa Pelayanan COVID - 19 XI	1,057,371,462	-
Utang Jasa Pelayanan COVID - 19 XII	1,106,559,384	-
Utang Jasa Pelayanan COVID - 19 XIII	2,259,235,493	-
Utang Jasa Pelayanan COVID - 19 XIV	1,972,680,917	-
Utang Jasa Pelayanan COVID - 19 XV	656,662,125	-
Utang Jasa Pelayanan COVID - 19 XVI	42,679,623	-
Utang Jasa Pelayanan COVID - 19 XVII	184,406,995	_
Utang Jasa Pelayanan COVID - 19 XVIII (Belum Verif)	2,173,888	_
Utang Jasa Pelayanan COVID - 19 Klaim dispute	134,429,274	_
Utang Jasa Pelayanan BPJS Februari Pending 2020	<del>-</del>	722,950
Utang Jasa Pelayanan BPJS Pending bulan Mei II 2020	-	602,452
Utang Jasa Pelayanan BPJS Pending Bulan Juli II 2020	-	18,960,480
Utang Jasa Pelayanan BPJS Pending Bulan September 2020	_	18,288,526
Utang Jasa Pelayanan COVID - 19 tahap 1	_	846,464,000
Utang Jasa Pelayanan COVID - 19 Tahap II	_	558,632,000
Utang Jasa Pelayanan COVID - 19 Tahap III	_	1,152,876,000
Utang Jasa Pelayanan COVID - 19 Tahap IV	_	1,194,220,760
Utang Jasa Pelayanan COVID - 19 Tahap V	_	1,698,586,080
Utang Jasa Pelayanan covid-19 oktober 2020	_	2,292,824,080
Utang Jasa Pelayanan covid-19 November 2020	_	5,642,336,600
Utang Jasa Pelayanan covid-19 Desember 2020	_	4,595,570,320
otalig Jasa i elayahan covid-19 Desember 2020	-	4,595,570,520
Jumlah Utang Pembayaran Jasa Pelayanan	11,278,528,765	19,636,138,110
	2021	2020
e) Utang Jangka Pendek Lainnya		
Utang atas kekeliruan transfer PT Jasa Raharja	-	7,780,700.00
Utang Jangka Pendek Lainnya	-	7,780,700.00

DENGAN ANGKA PEMBANDING TAHUN 2020 (Dinyatakan dalam Rupiah Penuh)

### 15. EKUITAS

Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.223.810.703.387,- dan Rp.170.502.299.904,-. Ekuitas adalah hak BLUD RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo atas aset setelah dikurangi seluruh kewajiban yang dimiliki. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Ekuitas Awal Surplus/Defisit Tahun Lalu	28,186,518,160	28,186,518,160
Saldo Awal	440 045 704 745	103,765,063,036
Koreksi Pencatatan Utang	142,315,781,745	103,703,003,030
-	15,265,360	(0)
Koreksi Saldo Awal Alat Kedokteran	-	(3)
Koreksi Saldo Awal Akum. Penyusutan Aset Tetap	-	(310,712,743)
Koreksi Saldo Awal Akum. Penyusutan Alat Kantor	-	(269,610)
Saldo Akhir	142,331,047,105	103,454,080,680
Surplus/Defisit Tahun Berjalan	53,293,940,865	38,861,701,064
Ekuitas Akhir	223,811,506,130	170,502,299,904
PENDAPATAN		
Saldo Pendapatan per 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut :		
	2021	2020
a) Pandanatan laga Layanan	152 220 755 210	100 000 400 055
<ul><li>a) Pendapatan Jasa Layanan</li><li>b) Pendapatan Hibah</li></ul>	152,320,755,219 2,201,088,864	108,900,400,855
	2,044,487,923	2,403,883,224 1,656,191,017
c) Pendapatan Usaha Lainnya d) Pendapatan APBD	57,823,574,315	54,099,512,011
	184,854,767	87,807,771
e) Pendapatan Non Operasional	104,034,707	07,007,771
Jumlah Pendapatan	214,574,761,088	167,147,794,878
Adapun rincian Pendapatan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 disa	ajikan sebagai berikut:	
a) Pendapatan Jasa Layanan		
a) Penuapatan Jasa Layanan	2021	2020
Pendapatan Tunai	182,535,504,282	89,497,306,922
Mutasi Bersih Piutang	(30,184,066,871)	19,403,093,933
Mutasi Bersih Pendapatan Diterima Di Muka	(30,682,192)	-
Jumlah Pendapatan Jasa Layanan	152,320,755,219	108,900,400,855
h) Bandanatan Hibah		_
b) Pendapatan Hibah	2021	2020
Hibah dari Dinas Kesehatan Kab. Semarang	1,464,693,405	703,219,964
Hibah dari Dinkes Prov Jateng	241,797,000	347,568,540
Hibah dari RSUD dr Gondo Suwarno	230,880	1,395,108
Hibah dari RS K.R.M.T Wongsonegoro	84,942	-
Hibah dari Balkesmas	2,077,335	7,453,254
Hibah dari Swasta	137,565,760	516,846,976
Hibah Aset dari Prov Jateng	309,999,542	-
Hibah Aset dari Kemenkes	44,640,000	-
Hibah RS Bina Kasih	-	465,036
Hibah Aset Tetap DinProv Jateng (Alkes)	-	747,150,000
Hibah Aset Tetap dari BKUD (Sepeda Motor)	-	29,415,346
Hibah Aset Tetap dari BKUD (Mobil)	-	50,369,000
•		

# DENGAN ANGKA PEMBANDING TAHUN 2020

(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh)

	Limich Bandoneton Hibah	2 204 000 064	2 402 992 224
16 1	Jumlah Pendapatan Hibah PENDAPATAN	2,201,088,864	2,403,883,224
	. 21.27.47.17.41		
(	c) Pendapatan Usaha Lainnya		
		2021	2020
	Pendapatan Diklat - LO	1,350,413,000	1,871,500
	Pendapatan Sewa - LO	129,000,000	258,354,000
	Pendapatan Jasa Giro - LO	437,092,923	746,540,500
	Pendapatan Parkir - LO	124,712,000	59,500,000
	Pendapatan Fotokopi -LO	670,000	4,661,500
	Pendapatan Lainnya - LO	2,600,000	558,906,105
	Jumlah Pendapatan Usaha Lainnya	2,044,487,923	1,629,833,605
(	d) Pendapatan APBD		
		2021	2020
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	38,971,828,800	30,882,450,219
	Milik Daerah	90,526,002	-
	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	1,216,201,047	15,019,945,869
	Belanja Modal Pengadaan Alat Alat Kesehatan	-	5,493,878,411
	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	12,562,595,632	-
	Pengadaan Obat, Vaksin	598,145,416	1,272,212,500
	Pengadaan Bahan Habis Pakai	453,384,424	1,431,025,012
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	3,930,892,994	-
	Jumlah Pendapatan APBD	57,823,574,315	54,099,512,011
	e) Pendapatan Non Operasional Rp 184.855.748  Akun Pendapatan Non Operasional menunjukkan surplus dari kegiatan non beban penyisihan piutang tahun 2020 yang terbayar di tahun 2021.		
		2021	2020
	Pendapatan Non Operasional	184,854,767	87,807,771
	Jumlah Pendapatan Non Operasional	184,854,767	87,807,771
17. E	BEBAN		
5	Saldo Beban per 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut :		
		2021	2020
	a) Beban Operasi - LO	149,223,296,766	117,561,168,666
	b) Beban Penyusutan dan Amortisasi	11,166,506,616	10,165,275,740
	c) Beban Penyisihan Piutang	61,752,138	185,174,575
	d) Beban Premi Asuransi	107,627,420	37,044,928
	Jumlah Beban	160,559,182,939	127,948,663,909

### **DENGAN ANGKA PEMBANDING TAHUN 2020**

(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh)

#### 17. BEBAN (lanjutan)

Adapun rincian Beban per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 disajikan sebagai berikut:

#### a) Beban Operasi - LO

		2021	2020
1) E	Beban Pegawai		_
Е	Beban Gaji dan Tunjangan		
Е	Beban Gaji dan Tunjangan PNS	39,591,595,500	30,882,450,219
Е	Beban Gaji dan Tunjangan Non PNS	-	6,013,740,346
Е	Beban Jasa Pelayanan Untuk ASN	40,774,772,945	-
F	Honorarium PNS	-	-
F	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	-	79,277,000
F	Honorarium Pengelola Keuangan SKPD	10,200,000	19,200,000
ι	Jang Lembur	<u> </u>	62,276,500
J	lumlah Beban Pegawai	80,376,568,445	37,056,944,065

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.80.376.568.445,- dan Rp.37.056.944.065,-. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

	2021	2020
2) Beban Bahan Pakai Habis	·	
Bahan Alat Tulis Kantor	301,430,540	310,113,955
Beban Dokumen/ Administrasi Tender	-	-
Beban Alat Listrik dan Elektronik	123,059,050	198,318,551
Beban Perangko Materai dan Benda Pos Lainnya	9,177,800	7,706,000
Beban Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	170,160,787	246,445,771
Beban Bahan bakar/Bensin	55,195,281	37,468,120
Beban Bahan bakar/ Solar	38,079,516	48,971,330
Beban Pelumas/olie	-	5,108,398
Beban Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	28,030,000	11,073,000
Beban Gas Medis	1,457,165,705	962,494,140
Beban Gas Dapur	87,712,000	84,193,000
Beban Pengisian Air Minum	-	-
Beban Bahan Pakai Habis Kesehatan Medis	7,575,111,174	8,412,422,269
Beban Bahan Pakai Habis Kesehatan Non Medis	1,291,640,089	850,395,114
Beban Perlengkapan Ruang Pasien	177,386,250	69,131,124
Beban Linen	552,521,800	390,849,000
Jumlah Beban Bahan Pakai Habis	11,866,669,992	11,634,689,772

Jumlah Beban Bahan Pakai Habis untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.11.866.669.992,- dan Rp.11.634.689.772,-.

	2021	2020
3) Beban Bahan/ Material		
Beban Obat	14,508,318,031	12,062,061,070
Beban Darah	1,154,695,000	1,240,795,000
Beban Bahan Makan dan Minum Pasien	681,378,492	811,627,358
Beban Bahan dan Alat Laboratorium	3,726,988,995	3,317,846,446
Beban Bahan/Film Radiologi	354,529,296	322,254,346
Jumlah Beban Bahan/Material	20,425,909,813	17,754,584,218

Jumlah Beban Bahan/Material untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.20.425.909.813,- dan Rp.17.754.584.218,-.

# 17. BEBAN (lanjutan)

### **DENGAN ANGKA PEMBANDING TAHUN 2020**

(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh)

#### a) Beban Operasi - LO (lanjutan)

		2021	2020
4)	Beban Jasa Kantor		
	Beban Telepon	43,717,119	85,831,779
	Beban Air	110,040,229	106,864,180
	Beban Listrik	1,289,113,407	1,125,286,622
	Beban Surat Kabar/ Majalah	1,800,000	1,750,000
	Beban Kawat/ Faksimili/ Internet	38,662,800	-
	Beban Jasa Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi	57,244,800	11,986,496
	Beban Jasa Penguburan Mayat Tak Dikenal	988,000	2,886,000
	Beban Jasa Pelayanan Medis	14,189,119,294	40,928,591,198
	Beban Jasa Narasumber/Instruktur/Pelaksana Kegiatan	892,107,000	479,864,500
	Beban Laundry	19,984,000	29,685,500
	Beban Pemantauan Kuman	112,149,250	96,384,400
	Beban Jasa Pihak Ketiga	14,359,494,178	2,921,690,743
	Beban Jasa Cleaning Servise	889,062,000	708,012,000
	Beban Perijinan	-	4,000,000
	Beban Keanggotaan	13,500,000	13,500,000
	Jumlah Beban Jasa Kantor	32,016,982,077	46,516,333,418

Jumlah Jasa Kantor untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.32.016.982.077,- dan Rp.46.516.333.418,-. Beban Jasa Kantor terdiri dari beban konsumsi atas jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan kantor serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

	2021	2020
5) Beban Perawatan Kendaraan Bermotor		
Beban Penggantian Suku Cadang	11,303,949	31,847,246
Beban Pajak Kendaraan Bermotor	2,896,500	6,135,440
Jumlah Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	14,200,449	37,982,686

Jumlah Beban Perawatan Kendaraan Bermotor untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.14.200.449,- dan Rp.37.982.686,-.

	2021	2020
6) Beban Cetak dan Penggandaan		
Beban Cetak	319,301,100	362,674,120
Beban Penggandaan	61,165,850	61,169,776
Jumlah Beban Cetak dan Pengadaan	380,466,950	423,843,896

Jumlah Beban Cetak dan Penggandaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.280.460.950,- dan Rp.423.843.896,-.

	2021	2020
7) Beban Sewa	219,960,000	182,856,000

Jumlah Beban Sewa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.219.960.000,- dan Rp.182.856.000,-

(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh)

#### 17. BEBAN (lanjutan)

#### a) Beban Operasi - LO (lanjutan)

	2021	2020
8) Beban Makanan dan Minuman		
Beban Makanan dan Minuman Harian Pegawai	865,357,600	474,261,600
Beban Makanan dan Minuman Rapat	240,863,000	164,139,400
Beban Makanan dan Minuman Tamu	8,625,000	4,815,000
Jumlah Beban Makanan dan Minuman	1,114,845,600	643,216,000

Jumlah Beban Makanan dan Minuman untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.1.114.845.600,- dan Rp.643.216.000,-.

	2021	2020
9) Beban Pakaian		
Beban Pakaian Dinas Harian, Batik, Lurik	5,200,000	-
Beban Pakaian Kerja Lapangan	31,675,000	132,036,000
Jumlah Beban Pakaian	36,875,000	132,036,000

Jumlah Beban Pakaian untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.36.875.000,- dan Rp.132.036.000,-.

	2021	2020
10) Beban Perjalanan Dinas		
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	<u>-</u>	14,140,000
Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	28,360,000	57,043,122
Jumlah Beban Perjalanan Dinas	28,360,000	71,183,122

Jumlah Beban Pakaian untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.28.360.000,- dan Rp.71.183.122,-

	2021	2020
11) Beban Pemeliharaan		
Beban Kalibrasi	409,460,051	382,480,346
Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran	575,199,279	369,261,941
Beban Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	87,627,846	35,937,591
Beban Pemeliharaan Meubelair	8,250,000	1,800,000
Beban Pemeliharaan Alat Studio dan Alat Komunikasi	250,000	137,715,000
Beban Pemeliharaan Peralatan Kantor dan Perlengkapan Elektronik	241,996,310	65,296,400
Beban Pemeliharaan Alat Rumah Tangga	-	234,119,133
Beban Pemeliharaan Gedung Kantor	947,102,936	1,268,812,409
Beban Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	257,807,500	254,572,802
Beban Pemeliharaan Taman	9,715,500	7,541,600
Jumlah Beban Pemeliharaan	2,537,409,422	2,757,537,222

Jumlah Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.2.537.409.422,- dan Rp.2.757.537.222,-.

(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh)

### 17. BEBAN (lanjutan)

18.

a)	Beban Operasi - LO ( <i>lanjutan</i> )	2021	2020
	12) Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi		
	dan Bimbingan Teknis	005 040 047	0.40,000,000
	Beban Kursus-kursus singkat/ pelatihan Jumlah Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi	205,049,017	349,962,266
	dan Bimbingan Teknis	205,049,017	349,962,266
	Jumlah Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember masing sebesar Rp.205.049.017,- dan Rp.349.962.266,	er 2021 dan 31 Desember	2020 adalah masing-
	JUMLAH BEBAN OPERASI-LO	149,223,296,766	117,561,168,666
		2021	2020
b)	Beban Penyusutan dan Amortisasi		
	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	7,289,317,248	6,472,513,573
	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	3,604,897,135	3,418,263,694
	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	268,693,733	263,064,773
	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	7,835,200
	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	3,598,500	3,598,500
	JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	11,166,506,616	10,165,275,740
		2021	2020
c)	Beban Penyisihan Piutang Beban Penyisihan Piutang Pendapatan	61,752,138	185,174,575
	200an on on one of the		100,174,070
	JUMLAH BEBAN PENYISIHAN PIUTANG PENDAPATAN	61,752,138	185,174,575
		2021	2020
d)	Beban Premi Asuransi	407.007.400	07.044.000
	Beban Premi Asuransi	107,627,420	37,044,928
	Jumlah Beban Premi Asuransi	107,627,420	37,044,928
JU	MLAH BEBAN	160,559,182,939	127,948,663,909
KE	GIATAN NON OPERASIONAL		
	do Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berik	kut :	
		2021	2020
0	Who (D. Gaia) Danisa I and Alam I		
	plus/(Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	-	(007 400 005)
(Ke	rugian) Penurunan Aset	(721,637,284)	(337,429,905)
Su	plus/Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya	(721,637,284)	(337,429,905)

Keuntungan/ Kerugian sebesar Rp.721.637.284,- adalah merupakan penurunan nilai aset dikarenakan dilakukannya penghapusan atas aset tetap dan asset lain lain.

(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh)

#### 19. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

#### a) Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas Awal pada 2021 dan 2020 adalah masing - masing sebesar Rp.170.502.299.904,- dan Rp.131.640.598.840,-.

#### b) Surplus (Defisit) LO

Jumlah Surplus (Defisit) LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing Rp.53.293.940.865,- dan Rp.38.861.701.064,- Surplus (Defisit) LO merupakan selisih kurang antara Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional, Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional, dan Pos Luar Biasa.

#### c) Koreksi Nilai Hutang

Jumlah Koreksi atas Nilai Hutang untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing - masing sebesar Rp.15.265.360,- dan Rp0.

#### d) Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.223.811.506.130,- dan Rp.170.502.299.905,-.

#### 20. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

### a) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.105.935.934.743,- dan Rp.14.555.268.263,-. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran sampai dengan 31 Desember 2021 merupakan Surplus/(Defisit) dari pembiayaan anggaran.

#### b) Saldo Anggaran Lebih

Saldo anggaran lebih untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.105.935.934.743,- dan Rp.14.555.268.263,-.

### 21. PENYELESAIAN LAPORAN

Manajemen RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah selesai pada tanggal 25 Februari 2022.